

DAMPAK PERANG TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN DI ALEPPO SURIAH TAHUN 2016–2020

Achmad Ziedhane¹ & Mohammad Riza Widyarsa²

Abstrak

Perang merupakan suatu bentuk tindakan yang bisa membawa dampak besar bagi negara, bahkan bagi dunia. Dampak dari adanya perang juga tidak hanya dilihat pada dari segi suatu negara, tetapi dampak dari perang justru paling besar di rasakan oleh masyarakat sipil, termasuk perempuan. Adapun salah satu perang yang hingga sekarang menjadi perang yang banyak menyita perhatian dunia adalah perang yang ada di Aleppo Suriah. Perang yang ada di Suriah pula telah berlangsung lama bahkan hingga sekarang. Tidak sedikit kerugian dan keikutsertaan masyarakat dunia di dalam konflik yang ada di Suriah ini yang hingga pada akhirnya menambah membesarnya perang di negara tersebut. Tentu pada akhirnya adanya perang yang ada di Suriah membawa kerugian bagi masyarakat sipil di sana, khususnya perempuan. Tidak sedikit perempuan di Suriah yang pada akhirnya harus merasakan kerugian dan kekerasan. Melihat bagaimana tingginya kekerasan perempuan dengan adanya perang Suriah ini yang menjadi tujuan penulis membuat tulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kekerasan perempuan akibat adanya perang Suriah meningkat pesat khususnya di tahun 2016 – 2020. Adapun untuk membuktikan hal tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dan teori feminisme serta data pendukung yang akurat agar bisa mendukung argumennya penulis.

Kata kunci : eksploitasi, feminisme, kekerasan, perang Suriah, perempuan.

Abstract

War is a form of action that can have a big impact on the country, even for the world. The impact of war is also not only seen from the perspective of a country, but the impact of war is felt by civil society, including women. As for one of the wars that until now has become a war that has seized the world's attention is the war in Aleppo, Syria. The war in Syria has also been going on for a long time even now. Not a few losses and the participation of the world community in the conflict in Syria which in the end added to the enlargement of the war in the

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, NIM 119105076

² Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina

country. Of course, in the end, the war in Syria brought losses to the civil society there, especially women. Not a few women in Syria who ultimately have to feel the loss and violence. Seeing how high the violence against women is due to the Syrian war, this is also the goal of the writer to write this article. Based on the results of the author's research, violence against women due to the Syrian war has increased rapidly, especially in 2016 - 2020. To prove this, the author uses qualitative research and feminism theory as well as accurate supporting data in order to support the author's argument.

Keywords: exploitation, feminism, violence, the Syrian war, women.

PENDAHULUAN

Suriah adalah salah satu negara yang terletak di Asia Barat. Negara satu ini hingga sekarang menjadi negara yang mengalami konflik bersenjata atau perang. Perang atau konflik Suriah merupakan salah satu dari perang yang dikenal telah berlangsung cukup lama. Perang ini sendiri pertama kali berawal dari adanya protes karena dilakukannya penangkapan pada beberapa pelajar yang ada di Kota Daraa (Starr, 2015). Penangkapan ini terjadi pada sekitar tahun 2011 lalu yang mana penangkapan dilakukan pada 15 pelajar yang pada saat itu masih berumur sekitar 15 tahun. Mereka ditangkap akibat adanya penulisan slogan yang menuntut anti pemerintah di beberapa tembok kota.

Penulisan slogan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk aksi demonstrasi dari pelajar karena menuntut agar Presiden yang bernama Bashar al-Assad diturunkan dari jabatannya. Akibat adanya aksi

tersebut itu pula pada akhirnya pemerintahnya Suriah mengerahkan

banyak tentara nasionalnya agar menangkap dan meredakan pemberontakan atau aksi demonstrasi tersebut. Namun aksi pemberontakan itu tidak serta merta berhenti, justru dari adanya aksi itu pula membuat bentrokan dan aksi demonstrasi semakin panas. Dari pihak pemerintah Suriah bahkan tidak segan menggunakan berbagai senjata api agar dapat merepresif serta membungkam aksi tersebut.

Akibat adanya aksi yang dilakukan oleh pemerintahnya Suriah itu pada akhirnya aksi demonstrasi menjadi perang sipil yang semakin panas. Bahkan perang ini telah menjadi perang yang menggunakan senjata berupa senjata konvensional (Fahham & Kartaatmaja, 2014). Aksi protes yang muncul dari masyarakat sipil ini pada akhirnya membuat munculnya berbagai tuntutan agar Bashar Al-Assad segera diberhentikan

karena dinilai terlalu diktator. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai bentuk sistem multipartai dan juga muncul berbagai kebebasan dari rakyat yang ditrapkan pada sekitar tahun 1963.

Namun sayangnya, meskipun telah banyak dilakukan berbagai bentuk upaya reformasi, namun sayangnya hal tersebut ternyata tidak menghentikan rezim tersebut. Terhitung hingga tahun 2011 saja, rezimnya Assad terus melancarkan berbagai bentuk serangan serta operasi dengan menggunakan persenjataan yang hingga pada akhirnya berdampak pada masyarakat sipil. Ribuan dari masyarakat sipil juga banyak digempur dengan menggunakan tank, bom ataupun tembakan yang pada akhirnya membuat ribuan penduduknya Suriah harus terbunuh dan rumah-rumah mereka hancur. Menurut laporan dari organisasi kemanusiaan seperti misalnya ICRC ataupun UNHRC mengatakan bahwa korban yang terbunuh pada tahun 2011 saja mencapai lebih dari 700.000 orang (Setiawati, 2012).

Dampak ini juga turut dirasakan oleh perempuan Suriah yang harus merasakan kekerasan maupun eksploitasi akibat munculnya perang sipil tersebut. Sejak awal konflik, perang yang ada di Suriah telah menggusur lebih dari 6,6 juta orang secara internal dan melihat lebih dari 5,6 juta warga Suriah tersebar di perbatasannya. Hingga pada akhirnya

akibat adanya perang ini pula menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Suriah dan memiliki konsekuensi yang membawa dampak begitu signifikan bagi perempuan. Bahkan juga akibat adanya perang di Suriah membawa kerawanan pangan hingga hilangnya kesempatan pendidikan, lalu juga kurangnya air bersih maupun juga layanan kesehatan, dan tingginya tingkat kekerasan yang berbasis gender khususnya terhadap perempuan dan anak di dalam menghadapi beban krisis (United Nation Woman, 2018).

Rumusan Masalah

Penulis menemukan bahwa dampak yang dirasakan pada perempuan Suriah akibat adanya perang Suriah hingga tahun 2020. Salah satunya dibuktikan dengan meningkatnya pengungsi perempuan dan kekerasan maupun eksploitasi yang dirasakan oleh kelompok perempuan di Suriah. Dampak yang dirasakan oleh perempuan ini yang membawa penulis untuk meneliti secara spesifik ataupun mendalam mengenai “Bagaimana dampak perang terhadap meningkatnya kekerasan dan eksploitasi perempuan di Aleppo Suriah tahun 2016-2020?” dengan menggunakan kacamata feminisme agar bisa melihat bagaimana dampak dari adanya perang di Aleppo Suriah terhadap perempuan di kawasan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai bagaimana dampak dari adanya perang terhadap meningkatnya kekerasan maupun eksploitasi pada perempuan terkhususnya bagi perempuan di Aleppo Suriah di tahun 2016–2020 menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tentu metodenya lebih banyak melakukan penganalisisan secara mendalam. Penelitian jenis sendiri adalah menelitian yang di dalamnya menggunakan metode khusus untuk memahami serta mengeksplorasi bagaimana masalah atau kasus sosial (Creswell J. W., 2015). Oleh sebab itu di dalam jenis penelitian ini meneliti fenomena sosial, dan kasus yang penulis angkat juga berkenaan dengan sosial. Selain itu juga data yang dalam hal ini penulis gunakan adalah data literatur yang tentunya kredibel serta dapat dipercaya sehingga dapat banyak mendukung argumentasinya penulis mengenai kasus dari yang penulis angkat.

Sedangkan terkait pada fokusnya penelitian yang penulis angkat ialah penelitian yang di dalamnya juga memberikan batasan ataupun melihat data yang tentunya relevan maupun juga tidak. Sedangkan untuk unit analisis di dalam penelitian mengenai dampak perangnya Suriah ini penulis menggunakan unit analisisnya perempuan di Aleppo Suriah yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun juga eksploitasi. Oleh karena itu

pada akhirnya penelitian mengenai dampak dari adanya perang di Suriah terhadap perempuan ini menggunakan kualitatif.

Landasan Teori

Paradigma Feminisme

Feminisme telah berkembang diberbagai belahan dunia yang mana fokus pada feminisme itu sendiri ialah mengenai persamaan hak baik itu antara laki-laki maupun pada perempuan di segala aspek bidang kehidupan. Feminisme berkembang karena melihat sudut gender yang mana pada sebelum masa berkembangnya feminis, antara laki-laki dan perempuan kurang mendapatkan keadilan dan sering terjadi pertentangan. Dalam istilah Indonesia, kata gender ini sendiri diambil atau diadopsi dari bahasa Inggris. Adapun makna dari gender ini mempunyai bentuk perbedaan antara seks dan juga gender itu sendiri.

Mengenai istilah gender ini dikembangkan oleh Robert Stoller. Menurut Stoller, gender ialah bentuk perbedaan perilaku yang dimana antara laki-laki maupun juga dengan perempuan memiliki bentuk perbedaan, karena di sini ia beranggapan bahwa adanya perilaku dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri merupakan wujud dari konstruksi sosial, bukan kodrat Tuhan. Maka dari itu makna gender terus mengalami bentuk perubahan. Adapun dari adanya gender ini sendiri

hingga sekarang menimbulkan bentuk permasalahan berupa bentuk ketidakadilan gender (Faqih, 2008). Adapun adanya bentuk ketidakadilan dari gender itu sendiri merupakan bentuk dari adanya marginalisasi ataupun juga karena adanya proses terhadap kemiskinan, lalu juga karena adanya stereotype, kekerasan dan adanya bentuk lainnya.

Maka dari itu feminis melihat pada isu gender dan mencoba untuk menghilangkan pertentangan-pertentangan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Bahkan feminis itu sendiri melihat dan menolak pada apa yang namanya sistem patriarki yang ada di masyarakat, bahkan feminis menolak pada disiplin yang mana berpusat pada laki-laki (Karim, 2014). Feminis itu sendiri mempunyai tujuan pokok yang mana tujuannya yaitu untuk memahami penindasan perempuan baik secara gender, pilihan seksual, kelas, dan bagaimana untuk mengubahnya. Di dalam feminisme itu sendiri mengungkapkan mengenai nilai-nilai penting yang dimiliki atau dialami oleh perempuan. Bahkan feminisme melihat pengalaman serta apa saja yang diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri.

Dari teori feminisme ini sendiri dapat menganalisis bagaimana pelecehan seksual terjadi di masyarakat, khususnya juga di dalam melihat isu perempuan yang

terjadi akibat adanya perang Suriah. Feminis melihat bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Suriah pada akhirnya harus merasakan kekerasan maupun juga eksploitasi yang tidak pantas. Maka dari itu di sini mengenai makna gender terus mengalami bentuk perubahan. Adanya gender ini sendiri hingga sekarang menimbulkan bentuk permasalahan berupa bentuk ketidakadilan gender (Karim, 2014). Adapun adanya bentuk ketidakadilan dari gender itu sendiri merupakan bentuk dari adanya marginalisasi ataupun juga karena adanya proses terhadap kemiskinan, lalu juga karena adanya stereotype, kekerasan dan adanya bentuk lainnya.

PEMBAHASAN

Melalui bagian pembahasan ini di dalamnya akan dimulai pada deskripsi secara historis mengenai Suriah itu sendiri dan juga mengenai bagaimana pada akhirnya adanya perang yang ada di Suriah harus membawa dampak terhadap perempuan yang ada di wilayah tersebut. Serta seperti apa keterlibatan organisasi-organisasi tertentu di dalam melihat dampak dari adanya perang Suriah terhadap perempuan.

Gambaran umum mengenai Suriah

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah.

Adapun secara geografi, Suriah menjadi negara yang letaknya cukup strategis. Hal ini dikarenakan negara ini letaknya terhubung langsung pada laut Mediterania dan terhubung pada Libanon maupun Turki yang mana ketiga ini juga terhubung secara langsung dengan benua Afrika, Asia, maupun Eropa. Jalur dari wilayah ini terbilang strategis mengingat jalur tersebut adalah jalur yang telah lama menjadi jalur perdagangan. Bahkan dari wilayah-wilayah tersebut pula berbatasan secara langsung pada negara seperti Irak, Israel, maupun juga Yordania.

Suriah sebenarnya berasal dari bahasa arab. Negara satu ini terbilang tidak mempunyai wilayah yang besar seperti Turki. Bahkan menurut laporan dari CIA, negara Suriah luasnya hanya mencapai 185.180 km². Adapun luas dari negara yang satu ini pula kurang lebih sekitar 183.630 km², sedangkan untuk wilayah perairannya mencapai hingga 1.550 km² (Fahham & Kartaatmaja, 2014). Walaupun Suriah memiliki wilayah yang terbilang kecil, akan tetapi negara ini terkenal dengan negara yang kekayaan minyaknya melimpah, bahkan juga sumber daya alamnya yang lain juga melimpah seperti misalnya kekayaan akan biji besi, fosfat, garam buatan, marmer, dan sebagainya (CIA, 2016). Wilayah-wilayah yang ada di Suriah juga terdiri dari beberapa kota besar seperti misalnya Damaskus, Hama, Tratus,

dan lainnya termasuk Aleppo yang dimana wilayah di Aleppo menjadi kota yang populasinya paling terpadat dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Pada tahun 2016 sendiri, jumlah dari populasi yang ada di Suriah mencapai hingga 17.185.170 jiwa penduduk yang di dalamnya pula terdiri dari berbagai macam agama maupun juga suku. Adapun untuk dari segi pemerintahan sendiri, Suriah menjadi negara dengan memegang sistem pemerintahan republik presidensial. Dalam sistem ini, presiden yang menjadi kepala negaranya sedangkan untuk Perdana Menteriannya menjadi kepala pemerintahannya. Walaupun demikian, Suriah sendiri terkenal dengan gaya kepemimpinan yang begitu diktator yang mana ia memiliki kekuasaan yang cenderung mutlak.

Sedangkan dari segi partainya sendiri, Suriah dikenal sebagai negara yang hanya memiliki satu partai maka dari itu di sini masalah kekuasaan dan sebagainya banyak dikendalikan oleh satu kelompok partai saja. Pemilihan presiden yang ada di Suriah pula sifatnya lebih kepada turun temurun. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana setelah wafatnya Hafez al-Assad, pada akhirnya kepemimpinan langsung diganti dan dipindahkan pada Bashar al-Assad yang mana ia memimpin Suriah sejak 1971 lalu. Pada saat masa kepemimpinannya ini pula urusan

pemerintahan, dan bidang-bidang termasuk dari segi militer, ekonomi, koperasi desa juga dilakukan monopoli.

Beberapa kelompok yang ada di Suriah banyak mengalami diskriminasi yang pada akhirnya muncul berbagai bentuk pergolakan ataupun peperangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Maka dari itu tidak heran hingga sekarang perang pada masyarakat sipil tersebut masih berlanjut dan membawa dampak yang begitu besar bagi kelompok-kelompok tertentu termasuk pada kelompok perempuan. Bahkan Sekarang di tahun ke-11, krisis pengungsi Suriah tetap menjadi krisis pengungsi dan pengungsian terbesar di dunia saat ini. Sejak perang saudara Suriah secara resmi dimulai pada 15 Maret 2011, keluarga-keluarga telah menderita di bawah konflik brutal yang telah menewaskan ratusan ribu orang, mencabik-cabik bangsa, dan mengembalikan standar hidup selama beberapa dekade (World Vision, 2018).

Sekitar 6,8 juta orang di Suriah adalah pengungsi dan pencari suaka sedangkan 6,7 juta orang lainnya mengungsi di dalam wilayah Suriah. Ini berarti 13,5 juta warga Suriah secara total dipindahkan secara paksa, yang dimana kebanyakan itu muncul dari kelompok perempuan. Hampir 11,1 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dan sekitar setengah dari

orang yang terkena dampak krisis pengungsi Suriah adalah anak-anak maupun perempuan. Selain itu pula pusat perawatan kesehatan dan rumah sakit, maupun juga sekolah, serta utilitas, maupun sistem air dan juga sanitasi rusak atau hancur (World Vision, 2018).

Rezim Assad dan meningkatnya perang sipil di suriah

Perlu diketahui bahwasanya pada masa rezim Assad sendiri, ia berusaha keras untuk mengubah berbagai banyak kebiasaan termasuk pada masalah penyeruan kebebasan dan martabat pada masyarakat sipil di Suriah. Bahkan selain itu juga rezimnya Assad juga secara brutal menargetkan aktivis pasifis, pengacara dan tokoh politik yang menuntut reformasi sipil dan hukum yang menerapkan langkah-langkah seperti membebaskan penjahat ekstremis yang dihukum dari penjara, dan mengubah politik. Hal ini pada akhirnya membuat Suriah terlihat mengalami kekacauan. Tindakan tersebut, dikombinasikan dengan represi agresif, pelecehan, penyiksaan dan penggunaan propaganda, yang kemudian mengakibatkan warga sipil juga pada akhirnya mengangkat senjata sebagai pembelaan diri (World Vision, 2018). Selanjutnya fenomena tersebut berubah menjadi elemen konflik bersenjata dengan

masuknya senjata yang tidak terkendali ke negara tersebut. Adapun persenjataan-persenjataan itu sendiri banyak diberikan atau dibiayai oleh negara lain. Saat ini, peningkatan militerisasi dan proliferasi senjata memiliki dampak yang menghancurkan pada struktur masyarakat dan kesejahteraan warga sipil. Dan sementara itu juga adanya hal tersebut membawa dampak yang menghancurkan kelompok perempuan.

Sejak awal pemberontakan pada 2011, 53% warga sipil tewas akibat senjata peledak. Hal ini sendiri diakibatkan oleh rezim Assad yang mengizinkan penggunaan senjata peledak pada tahun 2014. Maka dari itu pula pada akhirnya lebih dari 35% jumlah korban tewas di Suriah (76.000 dari perkiraan 220.000 korban) terjadi pada tahun itu. Selanjutnya, hampir setengah dari korban global senjata peledak di dunia antara 2011-2013 terjadi di Suriah. Ini memiliki dampak yang menghancurkan kelompok perempuan dan anak perempuan, karena 74% dari korban adalah akibat dari senjata peledak dan 17% dari senjata ringan (Peace Women, 2019).

Selain itu juga, akibat dari penggunaan senjata peledak di daerah berpenduduk memiliki dampak besar pada sistem perawatan kesehatan karena penghancuran infrastruktur dan rumah sakit, dan menciptakan ketakutan pada masyarakat umum untuk bergerak dalam

situasi konflik bersenjata. Sebuah publikasi baru-baru ini menunjukkan bahwa antara Februari 2014 hingga Februari 2015, setidaknya 83 serangan terpisah terhadap fasilitas kesehatan dilaporkan. Sedangkan bagi perempuan, kurangnya akses terhadap kesehatan reproduksi dapat menjadi hukuman mati terutama di tempat-tempat di mana kematian ibu sudah tinggi. Tidak ada informasi terbaru tentang kematian ibu di Suriah tersedia.

Namun, Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) menyatakan bahwa 80% kematian Ibu dapat dicegah dengan akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Penting juga untuk disebutkan bahwa para penyintas serangan senjata peledak menderita menghadapi tantangan jangka panjang yang dimana banyak dari mereka harus mengalami kecacatan, lalu kemudian kerugian psikologis bahkan berdampak lebih besar pada perempuan dalam masyarakat. Dimana mereka memiliki akses yang lebih sedikit, lebih banyak pembatasan dan kebebasan bertindak yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki.

Pada sisi lain, terdapat berbagai bentuk upaya di dalam penyelesaian mengenai konflik ini. Akan tetapi selama konflik bersenjata, aturan hukum yang ada di Suriah sendiri sudah goyah. Hal ini dapat terlihat ketika rezim Suriah mengubah peradilan menjadi alat represi melalui

kombinasi undang-undang inkonstitusional dan pengadilan militer darurat. Lalu kemudian pemerintah Suriah memberikan kekuasaan tak terbatas kepada cabang keamanan yang di dalamnya memiliki reputasi dalam melakukan penyiksaan, maupun pelecehan serta eksploitasi (Peace Women, 2019).

Kegagalan ini mengakibatkan lebih banyak kekuatan yang diberikan kepada kelompok senjata dan kekerasan terhadap perempuan, pada anak-anak, serta warga sipil yang telah lanjut usia terpaksa harus terpinggirkan, tidak berdaya, dan bahkan juga tidak memiliki akses terhadap keadilan. Tidak hanya sampai disitu saja, Suriah juga dianggap sebagai negara yang benar-benar telah meninggalkan perannya dalam melindungi warga negara untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan memastikan keselamatan maupun juga keamanan terkhusus kepada perempuan.

Feminisme dan perempuan di Suriah

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya diskriminasi gender yang kerap kali terjadi membuat banyak bentuk gerakan ataupun tuntutan yang dikenal dengan *gender equality*. Adapun hal ini muncul dikarenakan adanya bentuk manifestasi dari bentuk diskriminasi yang kerap kali dirasakan oleh perempuan. Tidak jarang di sini perempuan mengalami bentuk marginalisasi, tidak hanya pada publik,

bahkan marginalisasi itu kerap dirasakan dan terjadi di lingkungan terdekat. Apalagi dengan adanya bentuk citra yang di konstruksi oleh masyarakat mengenai perempuan yang mana dikonstruksikan bahwa perempuan lemah, ataupun juga dikatakan tidak rasional, tidak cukup berani, tidak dapat menjadi pemimpin. Hal-hal tersebut menggambarkan bagaimana konstruksi dari masyarakat mengenai perempuan masih begitu minim. Sehingga tidak sedikit perempuan mengalami bentuk diskriminasi. Namun karena adanya konsep dari *gender equality*, memunculkan bentuk kesadaran dan membuat perempuan mulai banyak muncul di dalam peran-peran masyarakat. Hal ini pula yang dirasakan oleh kelompok perempuan yang ada di Suriah ketika terjadinya perang hingga tahun 2020.

Di Suriah kelompok perempuan banyak mengalami kekerasan dan juga mengalami eksploitasi, justru kelompok bersenjata dianggap menjadi satu-satunya sumber dari bentuk kekuasaan maupun keadilan. Bukan hanya itu saja, Suriah juga lebih banyak menyediakan akses bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan Suriah banyak yang dibiarkan tanpa kekuatan ataupun juga perlindungan sehingga terpaksa harus mundur. Hanya sedikit bentuk tindakan seperti pemberdayaan perempuan di Suriah. Jika ada pemberdayaan perempuan di Suriah pun,

masih perlu membutuhkan pengakuan dan kriminalisasi kejahatan berbasis gender dan pendekatan komprehensif untuk memerangi impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh semua kelompok yang memegang kendali. Menangani kejahatan-kejahatan ini membutuhkan adaptasi budaya reformasi, restitusi dan rehabilitasi, bukan hanya keadilan hukuman. Hanya pendekatan keadilan yang berpusat pada korban yang akan memberikan ruang untuk rehabilitasi, dukungan sosial dan psikososial, pemberdayaan dan pertumbuhan bagi perempuan maupun juga laki-laki.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk mengadaptasi pendekatan ekonomi politik yang layak untuk memahami kedalaman penderitaan perempuan dalam konflik yang sedang berlangsung. Konflik Suriah adalah contoh lain bagaimana pengalaman kekerasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari peran baru yang didiktekan kepada mereka oleh ekonomi perang yang sedang berkembang. Penargetan rezim Suriah terhadap warga sipil dan wilayah berpenduduk sipil dengan senjata peledak mengakibatkan kehancuran infrastruktur yang meluas. Peningkatan besar dalam pengeluaran militer dan runtuhnya sumber pendapatan tradisional dan mata uang lokal memberi tempat untuk perdagangan perang yang muncul yang memaksakan konstruksi

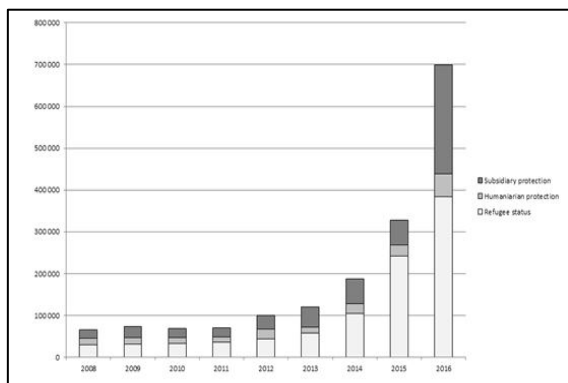
maskulin dan mengakibatkan ekonomi perang yang membawa beban tambahan pada perempuan.

Dampak perang Suriah terhadap perempuan di Aleppo Suriah

Akibat adanya perang yang terjadi di Suriah, para wanita yang ada di Suriah terpaksa harus memikul tanggung jawab baru sebagai kepala rumah tangga dan pengasuh utama untuk sejumlah besar anak-anak, ataupun juga orang tua dan yatim piatu. Sementara hak-hak mereka untuk bekerja, pendidikan dan bergerak hampir seluruhnya masih begitu terbatas. Tidak sedikit penelitian yang mengatakan bahwa Suriah adalah studi kasus feminisasi kemiskinan. Perempuan menjadi mayoritas masyarakat miskin bukan semata-mata karena kurangnya pendapatan atau ketidakmampuan untuk bekerja, tetapi juga karena kurangnya akses ke sumber daya produktif dan bias gender dalam hukum dan praktik (NGO Summary Report, 2019).

Dampak lain yang disebabkan akibat konflik suriah adalah memunculkan pengungsi. Pengungsi itu sendiri dikenal juga dengan seseorang ataupun kelompok orang yang dimana di sini meninggalkan wilayahnya karena adanya bentuk bencana ataupun juga karena adanya musibah (Romsan, 2003). Adapun terkait dengan isu mengenai pengungsi ini berkenaan dengan masalah keamanan kontemporer. Apalagi

jika melihat bagaimana kondisi pengungsi yang ada di kawasan Eropa. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir sejak gejolak di Timur Tengah, banyak komunitas yang berkonflik daerah seperti Suriah yang melarikan diri ke luar negeri. Pada umumnya mereka ingin mengungsi, di negara-negara di Eropa. Namun, dalam faktanya banyak negara Eropa yang tidak mau menerima imigran dari Timur Tengah karena krisis ekonomi yang melanda Eropa dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat



Eropa negara-negara yang tidak dapat menampung dan merawat para migran karena biaya yang terbatas.

Sumber : (Eurostat, 2019)

Adapun berkenaan dengan hal tersebut, menurut data dari Eurostat mencatat bahwa terdapat 2,5 juta pengungsi Suriah yang mencari suaka telah diajukan di Eropa pada 2015 dan 2016 dan kebanyakan itu merupakan pengungsi perempuan (Eurostat, 2019). Ribuan orang telah kehilangan nyawanya di jalan pengasingan. Meskipun sebagian besar

pengungsi tetap berada di negara-negara bagian selatan, namun adanya 'krisis migrasi' ini telah menempatkan masalah suaka sebagai pusat perhatian dan memicu ketegangan yang cukup besar di Eropa. Misalnya, Lucassen berargumen bahwa empat faktor yang menyebabkan pada 2015 membawa Eropa ke ambang kehancuran politik yaitu: 1) ketidaknyamanan dengan imigrasi dan integrasi kolonial dan tenaga kerja migran pada 1970-80an; 2) meningkatnya ketimpangan sosial dan pesimisme yang meluas tentang globalisasi; 3) meningkatnya ketakutan tentang Islam dan terorisme Islam; dan 4) munculnya partai populis kanan radikal (Lucassen, 2018).

Adapun tingginya kasus tersebut salah satunya yaitu adanya konflik yang melanda Suriah sejak 2011 berakibat timbulnya perang serta memakan korban jiwa yang cukup banyak. Hal ini tentu membuat warga Suriah terpaksa mengungsi ke negara lain karena adanya rasa tidak aman dalam diri mereka serta tentunya butuh perlindungan. Isu pengungsi Konflik yang melanda Suriah sejak 2011 berakibat timbulnya perang serta memakan korban jiwa yang cukup banyak. Kebanyakan dari masyarakat Suriah yang mengungsi ingin berlindung ditempat yang aman dan tentram seperti di negara Eropa. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat

direalisasikan karena negara-negara di Eropa banyak yang tidak menerima pengungsi Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena Eropa tengah dilanda krisis ekonomi serta mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu untuk menanggung hidup dan merawat para pengungsi.

Walaupun demikian, jika melihat data lapangan yang ada, wanita Suriah sebenarnya telah menunjukkan kemampuan hebat ketika mereka dilengkapi dengan ruang dan pilihan. Pada Januari 2016, 47 wanita Suriah dari berbagai latar belakang dan posisi berkumpul untuk mendirikan Inisiatif Wanita Suriah untuk Perdamaian dan Demokrasi dengan tujuan berkontribusi pada proses perdamaian yang memastikan penghentian segera pertempuran, menghilangkan pengepungan di wilayah sipil, membebaskan tahanan politik dan memastikan partisipasi efektif perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan serta proses negosiasi dan masa transisi (UN Women, 2018).

Mereka juga menawarkan untuk mengirim delegasi untuk mengamati proses negosiasi Jenewa II dan memastikan bahwa tuntutan dan pengalaman perempuan Suriah akan dihormati. Dokumen yang dikeluarkan oleh Inisiatif terbukti menjadi dokumen yang paling inklusif, seimbang dan berpusat pada sipil sejak

pemberontakan Suriah dimulai. Namun, terlepas dari upaya tak kenal lelah dari anggota inisiatif, utusan PBB berturut-turut untuk Suriah gagal menerjemahkan dukungan yang dijanjikan ke dalam tindakan. Oleh karena itu, perempuan Suriah terus absen dari negosiasi formal. Partisipasi perempuan di front oposisi juga terus minim dan keprihatinan perempuan tetap dikesampingkan. Marginalisasi ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan, termasuk kurangnya aspek gender dalam kebijakan yang muncul, tidak adanya pengalaman perempuan, dan penekanan pada persenjataan dan militerisasi melawan kepentingan pembangunan, resolusi konflik serta juga pembuatan perdamaian.

Pada sisi lain, dampak perang sipil yang ada di Suriah terhadap kekerasan serta eksploitasi pada perempuan semakin meningkat ketika terjadinya gencatan senjata pada tahun 2016. Meskipun gencatan senjata tersebut telah dicoba untuk ditengahi pada Februari 2016, akan tetapi tindakan tersebut gagal (NGO Summary Report, 2019). Hingga pada akhirnya kekerasan terhadap perempuan yang ada di Suriah kembali mengalami peningkatan, dan komunitas internasional gagal melindungi perempuan dan laki-laki Suriah dari kekejaman massal. Adapun menurut WILPF (*Women's International League for Peace and Freedom*) sendiri mereka

percata bahwa untuk mengatasi akar penyebab konflik penting untuk mencapai perubahan transformatif dan berkelanjutan.

Akan tetapi sayangnya beberapa laporan internasional dan nasional sendiri telah mengkonfirmasi bahwa akibat dari perang Suriah pada akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada di sana. Bahkan IRC (*International Rescue Committee*) melakukan penggambaran bagaimana bentuk tindakan pemerkosaan maupun juga eksploitasi menjadi sebuah dampak yang begitu menonjol dalam perang Suriah. Laporan FIDH (*Fédération internationale pour les droits humains*) menyatakan bahwa sebagian besar tuduhan pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilihat telah dilakukan oleh pasukan pemerintah dan “Shabiha” (milisi yang berafiliasi dengan pemerintah) (Starr, 2015).

Ada juga pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik atau di depan kerabat mereka. Beberapa korban diperkosa dan dibunuh oleh pemerkosa tanpa pertanggungjawaban, sehingga menimbulkan trauma berat di antara korban dan penyintas. Beberapa perempuan juga terpaksa menjalani kehamilan yang dipaksakan dan tidak diinginkan akibat perkosaan. Dalam UPR sebelumnya pada tahun 2011, Pemerintah Suriah menerima tiga belas rekomendasi sehubungan dengan

pembebasan semua tahanan dan pencegahan perlakuan buruk di penjara, dan menganggapnya telah terpenuhi. Namun, ini tidak akurat dan menyesatkan. Laporan internasional maupun juga statistik lokal telah merujuk pada penahanan ribuan perempuan. Banyak sekali tekanan sosial dan psikologis yang harus dialami oleh kelompok perempuan yang ada di Suriah akibat adanya perang Suriah.

Statistik pula telah menunjukkan bahwa 76% dari tahanan perempuan ditahan di cabang keamanan dan tempat penahanan rahasia, sementara hanya 24% berada di penjara pusat, di antaranya 83% ditahan di penjara pusat Damaskus, Adra, di mana pun mereka berada. Penjara Adra adalah tempat yang berbahaya karena terletak di zona pertempuran di mana operasi militer mencegah keluarga mengunjungi kerabat mereka yang ditahan, terutama mereka yang tinggal di provinsi lain (Centre for Feminist, 2018). Penahanan merupakan pengalaman sulit yang tidak dapat diatasi dalam kehidupan tahanan perempuan, bahkan setelah dibebaskan. Mereka tidak hanya disiksa tetapi juga dihina dan direndahkan. Dalam upaya berkelanjutan untuk menghancurkan tatanan masyarakat Suriah, Pemerintah Suriah dengan sengaja menangkap perempuan, mengetahui bahwa ini akan membawa aib bagi seluruh keluarga dalam masyarakat patriarki yang membatasi

kehormatan pada tubuh perempuan. Hal ini telah membuat banyak keluarga yang mendorong anak perempuan mereka untuk beremigrasi.

Selanjutnya penindasan dan kekerasan terhadap aktivis sipil perempuan oleh pasukan keamanan Suriah meningkat secara sistematis. Aktivis menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan penyiksaan di dalam dan di luar cabang keamanan dan pusat penahanan secara resmi dan tidak resmi. Selama penahanan, para aktivis menjadi sasaran penyiksaan, kurungan isolasi, lalu kemudian mengalami perlakuan buruk, pelecehan seksual dan terkadang pembunuhan di pusat-pusat penahanan formal dan lainnya yang tidak diakui, di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Penahanan memiliki implikasi yang berbeda bagi perempuan pada umumnya.

Dampak sosial, ekonomi dan psikologis yang parah tidak terbatas pada pemutusan hubungan kerja atau institusi pendidikan; bisa juga berarti perceraian dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat. Kementerian Keuangan Suriah telah memerintahkan pengambilalihan rumah dan properti dari banyak aktivis dan kerabat mereka dengan dalih bahwa mereka mendukung terorisme. Selain itu, beberapa perempuan dilecehkan di pos pemeriksaan militer pemerintah hanya karena mereka

adalah kerabat orang yang dicari atau di pos pemeriksaan hanya karena mereka berasal dari daerah pemberontak. Hanya aktivis yang diberi wewenang oleh pemerintah yang boleh masuk ke tempat penampungan dan memberikan layanan dan bantuan.

Rezim Suriah dan kelompok bersenjata yang berperang di Suriah terus menggunakan pengepungan dan kelaparan warga sipil sebagai senjata dalam permusuhan mereka. Lebih dari 20.000 warga sipil di kota Madaya telah dikepung sejak Juli 2015 dan belasan dari mereka meninggal karena kekurangan gizi. Bantuan dan perbekalan kesehatan dicegah, dihalangi atau disita, sedangkan yang sakit dan terluka tidak mendapat perawatan medis. PBB memperkirakan bahwa sekitar 400.000 orang tidak memiliki akses ke barang-barang bantuan yang menyelamatkan jiwa, di lebih dari 15 daerah yang terkepung di seluruh Suriah. Jumlah penduduk sipil di daerah yang sulit dijangkau telah mencapai 4,5 juta orang. Pengepungan berdampak buruk pada perempuan dan secara tidak proporsional. Kurangnya makanan dan perawatan medis telah berdampak negatif terhadap kesehatan wanita hamil dan menyusui, dan menyebabkan tingkat kematian bayi menjadi lebih tinggi. Bahkan juga mayoritas wanita hamil di daerah Aleppo Suriah banyak yang terkepung menderita

anemia, dan kasus aborsi telah meningkat (NGO Summary Report, 2019).

Bahkan juga Sepanjang perjalanan konflik Suriah, perempuan telah terpengaruh secara tidak proporsional oleh kekerasan dan umumnya dikeluarkan mereka banyak yang terpaksa harus dikeluarkan dari negosiasi perdamaian. Diikutsertakannya perempuan Suriah dalam negosiasi damai adalah kebutuhan untuk Suriah pasca-konflik yang stabil. Inklusi mereka di semua tingkat proses pembangunan perdamaian sangat penting untuk menciptakan perdamaian jangka panjang dan memiliki potensi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara ini. Dengan kemungkinan kemenangan militer Assad, perempuan Suriah akan menghadapi banyak tantangan agar suara mereka didengar dalam proses rekonstruksi.

Perempuan Suriah telah kehilangan anggota keluarga, menghadapi kemiskinan dan kelaparan, dan kehilangan akses ke pendidikan. Sementara konflik Suriah tidak meninggalkan siapa pun tanpa cedera, perempuan sangat terpengaruh dan pada akhirnya banyak yang menjadi pengungsi. Padahal selama ini perempuan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Suriah. Keterlibatan perempuan Suriah dalam proses pembangunan perdamaian adalah suatu keharusan, seperti halnya modernisasi hukum Suriah untuk

memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini akan membantu memberikan suara perempuan dalam pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat setelah konflik.

KESIMPULAN

Perang atau konflik Suriah merupakan salah satu dari perang yang dikenal telah berlangsung cukup lama. Perang ini sendiri pertama kali berawal akibat adanya protes karena dilakukannya penangkapan pada beberapa pelajar yang ada di Kota Daraa. Akibat adanya aksi tersebut itu pula pada akhirnya pemerintahnya Suriah mengerahkan banyak tentara nasionalnya agar menangkap dan meredakan pemberontakan atau aksi demonstrasi tersebut. Namun tentu dari aksi pemberontakan itu pula tidak dengan serta merta berhenti, justru dari adanya aksi itu pula membuat bentrokan dan aksi demonstrasi semakin panas. Dari pihak pemerintah Suriah bahkan tidak segan menggunakan berbagai senjata api agar dapat merepresif serta membungkam aksi tersebut. Dampak ini juga turut dirasakan oleh perempuan Suriah yang dimana perempuan yang ada di Suriah juga harus merasakan kekerasan maupun juga eksploitasi akibat munculnya perang sipil tersebut. Sejak awal konflik, perang yang ada di Suriah telah menggusur lebih dari 6,6 juta orang secara internal dan melihat lebih

dari 5,6 juta warga Suriah tersebar di perbatasannya. Hingga pada akhirnya akibat adanya perang ini pula menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Suriah dan memiliki konsekuensi yang membawa dampak begitu signifikan bagi perempuan. Dampak perang sipil yang ada di Suriah terhadap kekerasan serta

eksploitasi pada perempuan semakin meningkat ketika terjadinya gencatan senjata pada tahun 2016. Bahkan perempuan Suriah telah kehilangan anggota keluarga, menghadapi kemiskinan dan kelaparan, dan kehilangan akses ke pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Centre for Feminist. (2018). Women and the Syrian Conflict: How Women can
- CIA. (2016). The World Factbook. Retrieved from Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/sy.html>
- Creswell, J. (2010). Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, 2015 ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Eurostat. (2019). Statistik Suaka. Retrieved from EC Europa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya. Vol 5. No 1.
- Fahham, M., & Kartaatmaja. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. Politica Vol 5, No.1 .
- Faqih, M. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial / Mansour Fakih (cetakan 1 ed.). Yogyakarta: NSISTPress.
- Faqih, M. (2010). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2014). Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan). Fikrah , Vol. 2 No 1.
- Karim, A. (2014). Kerangka Studi Feminisme. Retrieved from Media Neliti: <https://media.neliti.com/media/publications/60877-ID-kerangka-studi-feminisme-model-penelitian.pdf>
- Lucassen, L. (2018). Peeling an Onion: The "Refugee Crisis" from a Historical Perspective. Ethnic and Racial Studies Vol 41 (3) , 383-410.
- Muti'ah, S. (2012). Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan Islamisme? jurnal CMES Vol V No.1 Edisi Juli-Desember .
- NGO Summary Report. (2019). VIOLATIONS AGAINST WOMEN IN SYRIA AND THE DISPROPORTIONATE IMPACT OF THE CONFLICT ON THEM. Retrieved from NGO Summary Report: <https://iknowpolitics.org/sites/default/files/syria.pdf>
- Peace Women. (2019). #R2P10: The Impact of the Syrian Conflict on Women. Retrieved from Peace Women: <https://www.peacewomen.org/sites/default/files/R2P-Syrian%20Women.pdf>
- Romsan, A. (2003). Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. Bandung: Sanic Offset.
- Setiawati, S. M. (2012). Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-

Arabisme Dan Pan-Islamisme?
Jurnal CMES , Volume V no 1.

shape Syria's Future? Retrieved
from Centre for Feminist Foreign
Policy:

<https://centreforfeministforeignpolicy.org/journal/2018/4/17/women-and-the-syrian-conflict-how-women-can-shape-syrias-future>

Starr, S. (2012). *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*. London: Hust & Co.

Starr, S. (2015). *Revolt in Syria : Eye-Witness to the Uprising*. London: Hurst.

UN Women. (2018). *Crisis update: Women of Syria, eight years into the crisis*. Retrieved from UN Women: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/feature-syria-humanitarian-update>

United Nation Woman. (2018, August 13). *Crisis update: Women of Syria, eight years into the crisis*. Retrieved 2021, from <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/feature-syria-humanitarian-update>

World Vision. (2018). *Syrian refugee crisis: Facts, FAQs, and how to help*. Retrieved from World Vision: <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts>